

## **PENGUATAN NILAI KEWARGAAN MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM DI SEKOLAH DASAR: MODEL KONSEPTUAL SIKLUS PEMBELAJARAN KEWARGAAN**

**<sup>1</sup>Nur Indah Wahyuni, <sup>2</sup>Farid Fikri Khoirul Rasyid**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,  
Universitas Negeri Semarang

<sup>1</sup> indahnurindah@mail.unnes.ac.id, <sup>2</sup>faridfikri2005@students.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Penetapan kewargaan sebagai salah satu dimensi Profil Lulusan dan pemberlakuan pendekatan pembelajaran mendalam melalui regulasi tahun 2025 menuntut kerangka pedagogis yang jelas untuk menguatkan nilai kewargaan di sekolah dasar. Praktik yang ada cenderung menekankan hafalan pengetahuan kewarganegaraan dan kepatuhan pada aturan, sementara keterampilan dan watak kewargaan kurang mendapat ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterhubungan konseptual antara pendidikan kewargaan dan pendekatan pembelajaran mendalam, merumuskan model pembelajaran kewargaan untuk sekolah dasar, serta memetakan kondisi yang diperlukan agar model tersebut dapat diterapkan. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terhadap dokumen regulasi, buku rujukan, dan artikel bereputasi yang dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sejalan dengan tiga komponen pendidikan kewargaan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan. Berdasarkan keterhubungan tersebut, dirumuskan Model Siklus Pembelajaran Kewargaan yang terdiri atas empat fase: menjumpai isu kewargaan nyata, menalar dan berdialog, bertindak bersama, serta merefleksi dan merayakan. Model ini hanya efektif apabila didukung iklim kelas yang demokratis, keteladanan guru, dan kemitraan dengan keluarga serta masyarakat. Artikel ini menawarkan landasan konseptual bagi guru dan pengembang kurikulum serta proposisi yang dapat diuji dalam penelitian empiris.

**Kata Kunci:** nilai kewargaan, pembelajaran mendalam, pendidikan kewargaan, profil lulusan, sekolah dasar

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan kewargaan merupakan amanat mendasar sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang menegaskan kembali Pendidikan Pancasila sebagai muatan wajib kurikulum. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan kewargaan memiliki arti strategis karena di sekolahlah anak pertama kali mengalami kehidupan bersama dalam kelompok besar di luar keluarga. Di kelas, anak belajar menyepakati aturan, berbagi peran, menyelesaikan perselisihan, dan hidup berdampingan dengan teman yang berbeda latar belakang.

Kebijakan kurikulum tahun 2025 memberi arah baru pada upaya tersebut. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan menetapkan delapan dimensi Profil Lulusan, dan kewargaan merupakan salah satunya. Pada saat yang sama, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam ke dalam kerangka dasar kurikulum. Pendekatan ini bertumpu pada tiga prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta diwujudkan melalui pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi (Kemendikdasmen, 2025a). Istilah pembelajaran mendalam dalam kebijakan ini merujuk pada pendekatan pedagogis, bukan pada teknik kecerdasan buatan yang juga dikenal dengan nama *deep learning*. Perbedaan ini penting karena sebagian tulisan mencampurkan keduanya. Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan gagasan Fullan,

Quinn, dan McEachen (2018) bahwa pembelajaran mendalam menumbuhkan kompetensi karakter dan kewargaan melalui keterlibatan siswa dengan persoalan nyata.

Dalam kajian pendidikan kewargaan, kewargaan tidak dipahami semata sebagai pengetahuan tentang negara. Branson (1998) membedakan tiga komponen pendidikan kewargaan, yaitu pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan watak kewargaan (*civic dispositions*). Westheimer dan Kahne (2004) menunjukkan bahwa program pendidikan kewargaan dapat menghasilkan tipe warga yang berbeda, yaitu warga yang bertanggung jawab secara pribadi, warga yang partisipatif, dan warga yang berorientasi pada keadilan. Studi internasional juga menemukan bahwa iklim kelas yang terbuka bagi diskusi berkaitan dengan pengetahuan kewargaan dan kesediaan siswa untuk terlibat dalam kehidupan bersama (Torney-Purta et al., 2001; Campbell, 2008). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa cara nilai kewargaan diajarkan menentukan jenis warga yang terbentuk.

Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan kewargaan, seperti tanggung jawab, toleransi, dan kerja sama, tumbuh lebih kuat ketika pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa dan melibatkan diskusi (Rahmi, Rustini, dan Wahyuningsih, 2021; Lusiana dan Fatonah, 2022). Kajian tentang penerapan pembelajaran mendalam di sekolah berbasis alam juga menemukan bahwa siswa mengekspresikan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang reflektif dan kolaboratif (Wahyuni, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum merumuskan kerangka pedagogis yang secara eksplisit menghubungkan komponen pendidikan kewargaan dengan prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Di sisi lain, hambatan pendidikan karakter di sekolah dasar, seperti orientasi pada capaian kognitif, keterbatasan waktu, dan paparan media digital, telah banyak dilaporkan (Puteri et al., 2024; Sagala, Naibaho, dan Rantung, 2024), tetapi jarang dikaitkan dengan desain pembelajaran yang dapat mengatasinya.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) menganalisis keterhubungan konseptual antara komponen pendidikan kewargaan dan pendekatan pembelajaran mendalam; (2) merumuskan model pembelajaran kewargaan yang dapat diterapkan guru sekolah dasar; dan (3) memetakan kondisi pendukung serta hambatan penerapan model tersebut. Secara teoretis, artikel ini menawarkan sintesis antara teori pendidikan kewargaan, teori pendidikan karakter, dan kebijakan pembelajaran mendalam. Secara praktis, artikel ini menyediakan model, contoh operasional, dan proposisi yang dapat diuji dalam penelitian lanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan artikel konseptual dengan desain kajian literatur integratif (*integrative literature review*). Desain ini dipilih karena mampu mengkritisi dan menyintesis literatur dari berbagai jenis sumber untuk menghasilkan kerangka atau perspektif baru atas suatu topik (Torraco, 2005; Snyder, 2019). Penyusunan artikel mengikuti tipe *model* sebagaimana dikemukakan Jaakkola (2020), yaitu membangun kerangka yang menjelaskan hubungan antarkonsep dan menurunkan proposisi yang dapat diuji secara empiris.

Sumber kajian terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah dokumen regulasi, yaitu UU No. 20 Tahun 2003, Perpres No. 87 Tahun 2017, PP No. 4 Tahun 2022, serta Permendikdasmen No. 10 dan No. 13 Tahun 2025. Kelompok kedua adalah buku rujukan tentang pendidikan kewargaan, pendidikan karakter, dan teori belajar. Kelompok ketiga adalah artikel jurnal nasional dan internasional. Sumber dimasukkan jika memenuhi kriteria berikut: (a) membahas pendidikan kewargaan, pendidikan karakter, partisipasi anak, atau pembelajaran mendalam; (b) untuk artikel empiris, memiliki identitas terbitan yang jelas dan DOI atau terindeks; dan (c) untuk teori klasik, merupakan rujukan primer yang masih digunakan luas. Sumber tanpa identitas terbitan yang jelas atau yang tidak relevan dengan fokus kajian dikeluarkan.

Analisis dilakukan dengan analisis tematik (Braun dan Clarke, 2006) melalui enam langkah, yaitu mengenali isi sumber, melakukan pengodean awal, mencari tema, meninjau tema

lintas sumber, mendefinisikan dan menamai tema, serta menyusun sintesis dalam bentuk model dan proposisi. Pengodean awal difokuskan pada tiga kategori, yaitu komponen kewargaan, karakteristik pengalaman belajar, dan kondisi yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran kewargaan. Kondisi pendukung dan hambatan kemudian dipetakan menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner (1979). Keabsahan sintesis dijaga melalui triangulasi jenis sumber, yaitu regulasi, teori, dan temuan empiris, serta diskusi antarpengarang hingga tercapai kesepakatan terhadap setiap tema.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keterhubungan Pendidikan Kewargaan dan Pembelajaran Mendalam

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa pendidikan kewargaan dan pembelajaran mendalam memiliki titik temu pada tiga hal. Pertama, keduanya menolak pembelajaran yang berhenti pada hafalan. Pendidikan kewargaan yang hanya menyampaikan pengetahuan tentang lembaga negara atau bunyi sila belum membekali siswa dengan keterampilan dan watak kewargaan (Branson, 1998). Pembelajaran mendalam juga menekankan pemahaman yang bermakna dan dapat diterapkan, bukan sekadar penguasaan informasi (Kemendikdasmen, 2025a).

Kedua, keduanya memandang pengalaman nyata sebagai sumber belajar. Dewey (1916) sejak awal berpendapat bahwa demokrasi dipelajari dengan menjalaninya, sehingga sekolah perlu menjadi komunitas tempat anak mengalami kehidupan bersama. Gagasan ini sejalan dengan prinsip bermakna dalam pembelajaran mendalam yang menuntut keterkaitan antara materi dan kehidupan siswa. Ketiga, keduanya menempatkan refleksi sebagai bagian inti pembelajaran. Dalam teori pembelajaran eksperiensial, refleksi adalah tahap yang mengubah pengalaman menjadi pemahaman baru (Kolb, 1984), sedangkan dalam pembelajaran mendalam refleksi merupakan salah satu dari tiga pengalaman belajar.

Keterhubungan ini juga sejalan dengan tradisi pendidikan karakter. Lickona (1991) memandang karakter yang baik sebagai keterpaduan antara memahami nilai, merasakan pentingnya nilai, dan bertindak sesuai nilai. Ki Hajar Dewantara merumuskan hal serupa dalam tahapan *ngerti, ngrasa, nglakoni* (Dewantara, 1977). Pemetaan keterhubungan tersebut disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pemetaan Komponen Kewargaan terhadap Pembelajaran Mendalam**

| Komponen Kewargaan (Branson 1998) | Pengalaman Belajar Utama | Prinsip yang Menonjol        | Wujud pada Siswa SD                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengetahuan kewargaan             | Memahami                 | Bermakna                     | Mengetahui aturan kelas dan sekolah, hak dan kewajiban anak, simbol negara, serta alasan di balik aturan tersebut            |
| Keterampilan kewargaan            | Mengaplikasi             | Bermakna dan menggemblirakan | Menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan, bermusyawarah, berbagi peran, dan menyelesaikan perselisihan secara damai |
| Watak kewargaan                   | Merefleksi               | Berkesadaran                 | Menghargai perbedaan, bertanggung jawab, peduli pada kepentingan bersama, dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia    |

Sumber: sintesis penulis dari Branson (1998) dan Kemendikdasmen (2025a)

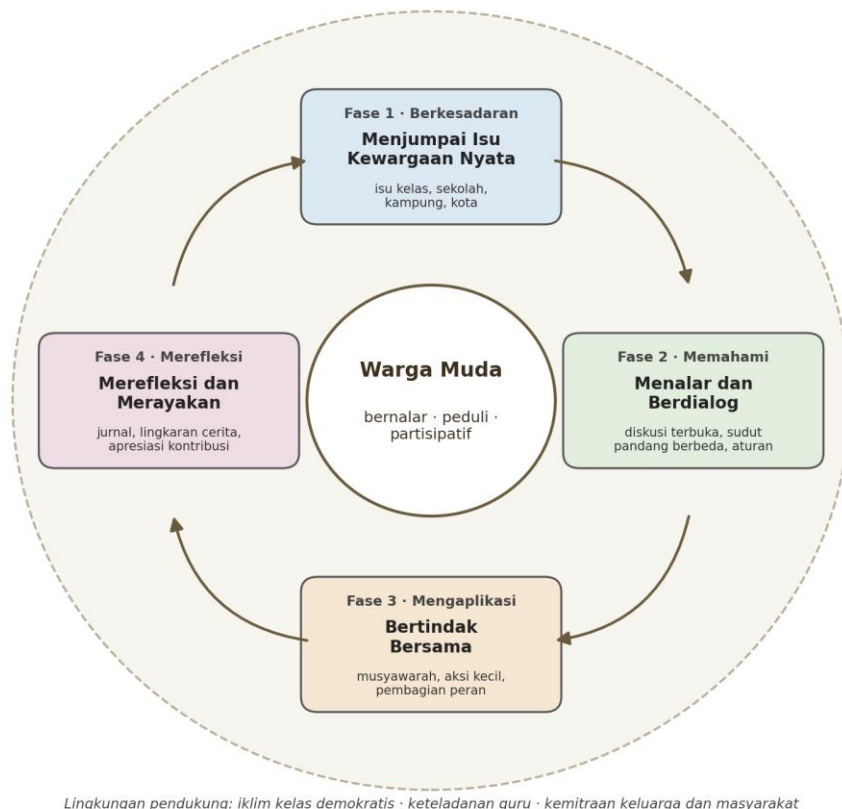
Pemetaan pada Tabel 1 tidak dimaksudkan sebagai pembagian yang kaku. Setiap pengalaman belajar dapat menyentuh ketiga komponen sekaligus. Namun, pemetaan ini

menunjukkan kecenderungan yang perlu diperhatikan guru. Jika pembelajaran hanya berhenti pada tahap memahami, yang terbentuk terutama adalah pengetahuan kewargaan. Keterampilan dan watak kewargaan memerlukan kesempatan untuk bertindak dan merefleksikan tindakan tersebut.

Pemetaan ini juga membantu menjelaskan tipe warga yang mungkin terbentuk. Pembelajaran yang menekankan kepatuhan pada aturan dan kebaikan pribadi, seperti menjaga kebersihan atau tertib antrai, cenderung membentuk warga yang bertanggung jawab secara pribadi (Westheimer dan Kahne, 2004). Tipe warga ini penting, tetapi belum cukup. Siswa juga perlu dilatih untuk merencanakan dan menjalankan kegiatan bersama, yaitu ciri warga yang partisipatif, serta mulai bertanya mengapa suatu masalah terjadi, yang merupakan benih warga yang berorientasi pada keadilan. Kajian di sekolah dasar Indonesia menunjukkan bahwa penguatan karakter masih sering berhenti pada pencantuman nilai dalam perencanaan dan pesan lisan guru (Puteri et al., 2024), sehingga ruang bagi partisipasi siswa masih terbatas.

### Model Siklus Pembelajaran Kewargaan

Berdasarkan keterhubungan di atas, artikel ini merumuskan Model Siklus Pembelajaran Kewargaan yang terdiri atas empat fase (Gambar 1). Keempat fase tersebut berlangsung dalam lingkungan pendukung yang terdiri atas iklim kelas yang demokratis, keteladanan guru, dan kemitraan dengan keluarga serta masyarakat. Model ini disebut siklus karena hasil refleksi pada fase terakhir menjadi titik awal bagi isu atau kegiatan berikutnya.



**Gambar 1. Model Siklus Pembelajaran Kewargaan di Sekolah Dasar**

**Fase 1: menjumpai isu kewargaan nyata.** Pembelajaran diawali dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa, misalnya kelas yang sering kotor setelah istirahat, perebutan giliran menggunakan fasilitas sekolah, teman yang tidak diajak bermain, atau sampah di selokan sekitar sekolah. Fase ini mewujudkan prinsip berkesadaran karena siswa diajak menyadari bahwa persoalan tersebut menyangkut kepentingan bersama. Guru dapat memunculkan isu

melalui pengamatan lingkungan, cerita, foto, atau pengalaman siswa sendiri, lalu merumuskannya menjadi pertanyaan pemantik, misalnya “Siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan kelas kita?”

**Fase 2: menalar dan berdialog.** Siswa mengkaji isu tersebut dengan mengumpulkan informasi sederhana, mendengarkan sudut pandang yang berbeda, dan menghubungkannya dengan aturan atau nilai yang berlaku, termasuk nilai-nilai Pancasila. Fase ini mewujudkan pengalaman belajar memahami. Kunci fase ini adalah iklim kelas yang terbuka, yaitu suasana ketika siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat. Iklim semacam ini terbukti berkaitan dengan pengetahuan dan keterlibatan kewargaan siswa (Torney-Purta et al., 2001; Campbell, 2008). Perspektif sosiokultural juga menegaskan bahwa pemahaman berkembang melalui dialog dengan orang lain (Vygotsky, 1978).

**Fase 3: bertindak bersama.** Siswa merencanakan dan melaksanakan tindakan kecil yang dapat mereka lakukan, misalnya menyusun jadwal piket melalui musyawarah, membuat kesepakatan kelas tentang penggunaan fasilitas, atau mengadakan kampanye kebersihan sederhana. Fase ini mewujudkan pengalaman belajar mengaplikasi dan merupakan tempat keterampilan kewargaan paling banyak dilatih. Tingkat keterlibatan siswa perlu diperhatikan. Hart (1992) mengingatkan bahwa partisipasi anak dapat bersifat simbolis jika anak hanya menjalankan keputusan orang dewasa. Lundy (2007) menambahkan bahwa pendapat anak baru bermakna jika anak diberi ruang, didengar, dan pendapatnya benar-benar dipertimbangkan. Karena itu, guru perlu memberi siswa kesempatan nyata untuk ikut memutuskan, sesuai tingkat perkembangan mereka.

**Fase 4: merefleksi dan merayakan.** Siswa merenungkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang berhasil, apa yang belum, dan apa artinya bagi kehidupan bersama. Bentuknya dapat berupa jurnal bergambar, lingkaran cerita, atau kartu refleksi dengan pertanyaan seperti “Apa yang berubah di kelas kita setelah kesepakatan dibuat?” Fase ini mewujudkan pengalaman belajar merefleksi dan berperan besar dalam membentuk watak kewargaan. Unsur merayakan, yaitu mengapresiasi kontribusi setiap siswa, mewujudkan prinsip menggembirakan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas kelas. Hasil refleksi kemudian menjadi dasar untuk menentukan isu atau perbaikan berikutnya.

Contoh penerapan keempat fase pada satu tema pembelajaran disajikan pada Tabel 2. Tema ini dapat dilaksanakan dalam Pendidikan Pancasila, dipadukan dengan muatan lain, atau dikembangkan menjadi kegiatan kokurikuler.

**Tabel 2. Contoh Operasional Model pada Tema “Kesepakatan Kelas Kita”**

| Fase                        | Kegiatan Guru dan Siswa                                                                                                                                       | Aspek Kewargaan yang Dikuatkan                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Menjumpai isu            | Siswa mengamati kondisi kelas selama satu minggu dan menceritakan kejadian yang membuat mereka tidak nyaman, misalnya antrean berebut atau barang yang hilang | Kepedulian pada kepentingan bersama                       |
| 2. Menalar dan berdialog    | Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang penyebab masalah, mendengarkan pendapat teman, dan membandingkan dengan aturan sekolah serta sila keempat Pancasila   | Pengetahuan tentang aturan; menghargai perbedaan pendapat |
| 3. Bertindak bersama        | Siswa mengusulkan butir kesepakatan, bermusyawarah untuk memilih yang disetujui, menandatangani kesepakatan, dan membagi peran pemantau secara bergilir       | Musyawarah; tanggung jawab; taat aturan                   |
| 4. Merefleksi dan merayakan | Setelah dua minggu, siswa menilai apakah kesepakatan berjalan, mengusulkan perbaikan, dan memberi apresiasi kepada teman yang berkontribusi                   | Kesadaran diri; rasa memiliki komunitas kelas             |

*Sumber: rancangan penulis*

Dari model ini diturunkan tiga proposisi untuk penelitian empiris selanjutnya. Proposisi pertama (P1), pembelajaran yang melibatkan siswa dalam fase bertindak bersama menghasilkan keterampilan kewargaan yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya berhenti pada fase menalar dan berdialog. Proposisi kedua (P2), iklim kelas yang terbuka memperkuat hubungan antara kegiatan dialog dan kesediaan siswa untuk berpartisipasi. Proposisi ketiga (P3), fase refleksi yang dilakukan secara teratur berkaitan dengan konsistensi perilaku kewargaan siswa di luar kegiatan pembelajaran.

### **Kondisi Pendukung dan Hambatan Penerapan Model**

Penerapan model tidak hanya bergantung pada desain kegiatan di kelas. Dengan menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner (1979), kondisi yang memengaruhi penerapan model dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan, yaitu kelas, hubungan sekolah dengan keluarga, serta kebijakan dan lingkungan yang lebih luas.

Pada lapisan kelas, kondisi pendukung utama adalah iklim kelas yang demokratis dan keteladanan guru. Siswa belajar dari perilaku orang dewasa yang diamatinya (Bandura, 1977), sehingga cara guru menanggapi pendapat siswa, menyelesaikan konflik, dan menepati kesepakatan menjadi pelajaran kewargaan tersendiri. Prinsip *ing ngarsa sung tuladha* dari Ki Hajar Dewantara menegaskan hal yang sama (Dewantara, 1977). Hambatan pada lapisan ini meliputi keterbatasan waktu akibat kepadatan materi, kecenderungan guru mengendalikan seluruh keputusan kelas, dan pemahaman yang belum utuh tentang pembelajaran mendalam (Puteri et al., 2024).

Pada lapisan hubungan sekolah dengan keluarga, nilai yang dilatih di sekolah perlu mendapat dukungan di rumah. Ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di kelas dan kebiasaan di rumah dapat membingungkan siswa (Puteri et al., 2024). Kerangka kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat menegaskan bahwa perkembangan anak paling kuat ketika ketiga pihak berbagi tujuan dan saling berkomunikasi (Epstein, 2011). Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten di sekolah dan di rumah juga membantu siswa mewujudkan nilai dalam perilaku sehari-hari (Belinda dan Halimah, 2023).

Pada lapisan kebijakan dan lingkungan yang lebih luas, terdapat dua tantangan utama. Pertama, sistem asesmen yang lebih menekankan capaian kognitif dapat mendorong guru mengutamakan penyelesaian materi daripada kegiatan partisipatif. Kedua, lingkungan digital memperkenalkan nilai dan model perilaku yang tidak selalu sejalan dengan nilai sekolah (Sagala, Naibaho, dan Rantung, 2024). Karena itu, kewargaan digital, yaitu penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab, perlu menjadi bagian dari isu yang dibahas dalam siklus pembelajaran kewargaan (Ribble, 2015). Temuan Berkowitz dan Bier (2007) menguatkan bahwa praktik pendidikan karakter yang efektif umumnya menggabungkan pengembangan profesional guru, keteladanan, interaksi antarsiswa, serta keterlibatan keluarga dan komunitas dalam satu desain.

### **Implikasi**

Bagi guru, model ini dapat digunakan sebagai kerangka dalam menyusun modul ajar Pendidikan Pancasila maupun kegiatan kokurikuler, dengan perhatian khusus pada fase bertindak bersama dan fase refleksi yang paling sering terlewat. Bagi sekolah, model ini menuntut budaya sekolah yang memberi ruang bagi suara siswa, misalnya melalui musyawarah kelas, pemilihan pengurus kelas yang sungguh-sungguh, dan forum siswa. Bagi pengembang kebijakan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, pelatihan guru perlu mencakup keterampilan memfasilitasi dialog, mengelola perbedaan pendapat, dan menilai keterampilan serta watak kewargaan, bukan hanya pengetahuan kewargaan.

### **SIMPULAN**

Penetapan kewargaan sebagai dimensi Profil Lulusan dan pemberlakuan pembelajaran mendalam membuka peluang untuk menguatkan pendidikan kewargaan di sekolah dasar secara lebih utuh. Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan serta pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sejalan

dengan komponen pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan. Keterhubungan tersebut dirumuskan menjadi Model Siklus Pembelajaran Kewargaan yang terdiri atas empat fase, yaitu menjumpai isu kewargaan nyata, menalar dan berdialog, bertindak bersama, serta merefleksi dan merayakan. Penerapan model memerlukan iklim kelas yang demokratis, keteladanan guru, dan kemitraan dengan keluarga serta masyarakat, sedangkan hambatannya terdapat pada lapisan kelas, hubungan sekolah dengan keluarga, serta kebijakan dan lingkungan digital.

Kajian ini bersifat konseptual sehingga model dan proposisi yang dirumuskan belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model melalui penelitian tindakan kelas, *design-based research*, atau studi kasus di sekolah dasar dengan karakteristik berbeda, serta mengembangkan instrumen asesmen keterampilan dan watak kewargaan yang sesuai untuk siswa sekolah dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, Albert. 1977. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Belinda, L. N., dan L. Halimah. 2023. "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan* 10 (1): 8–17. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v10i1.7201>.
- Berkowitz, Marvin W., dan Melinda C. Bier. 2007. "What Works in Character Education." *Journal of Research in Character Education* 5 (1): 29–48.
- Branson, Margaret Stimmann. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas, CA: Center for Civic Education.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3 (2): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Bronfenbrenner, Urie. 1979. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Campbell, David E. 2008. "Voice in the Classroom: How an Open Classroom Climate Fosters Political Engagement Among Adolescents." *Political Behavior* 30 (4): 437–454. <https://doi.org/10.1007/s11109-008-9063-z>.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewey, John. 1916. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Epstein, Joyce L. 2011. *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Edisi ke-2. Boulder, CO: Westview Press.
- Fullan, Michael, Joanne Quinn, dan Joanne McEachen. 2018. *Deep Learning: Engage the World, Change the World*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Hart, Roger A. 1992. *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. Innocenti Essays No. 4. Florence: UNICEF International Child Development Centre.
- Jaakkola, Elina. 2020. "Designing Conceptual Articles: Four Approaches." *AMS Review* 10: 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>.
- Kemendikdasmen. 2025a. *Pembelajaran Mendalam: Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua* (Naskah Akademik). Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikdasmen. 2025b. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang*

*Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Kemendikdasmen. 2025c. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kolb, David A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility.* New York: Bantam Books.
- Lundy, Laura. 2007. "'Voice' Is Not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child." *British Educational Research Journal* 33 (6): 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>.
- Lusiana, L., dan S. Fatonah. 2022. "Pendidikan Karakter pada Siswa melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4 (5): 6651–6660. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3067>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Puteri, M., M. Jannah, Nurmaniah, P. J. L. Pratama, dan R. Ananda. 2024. "Implementation and Challenges of Character Education in Social Studies Learning in Elementary Schools." *Jurnal Pendidikan IPS* 14 (1): 9–18. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i1.1564>.
- Rahmi, A., T. Rustini, dan Y. Wahyuningsih. 2021. "Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter Siswa SD melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (6): 5136–5142. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1640>.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ribble, Mike. 2015. *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know.* Edisi ke-3. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
- Sagala, K., L. Naibaho, dan D. A. Rantung. 2024. "Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital." *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi* 6 (1): 1–8. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1006>.
- Snyder, Hannah. 2019. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104: 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Torney-Purta, Judith, Rainer Lehmann, Hans Oswald, dan Wolfram Schulz. 2001. *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen.* Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Torraco, Richard J. 2005. "Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples." *Human Resource Development Review* 4 (3): 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>.

- Vygotsky, Lev S. 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wahyuni, Nur Indah. 2025. "Pancasila dalam Ekspresi Siswa: Aktualisasi Nilai dengan Pendekatan Pembelajaran Deep Learning di Sekolah Alam Kendal." *Jurnal Ilmiah Pendidik Indonesia* 4 (2): 170–180.
- Westheimer, Joel, dan Joseph Kahne. 2004. "What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy." *American Educational Research Journal* 41 (2): 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>.